



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Usut Proyek Jalan Bukit Makmur

ARGA MAKMUR - Anggota DPRD Bengkulu Utara (BU) Febri Yurdiman, SE meminta aparat hukum turun tangan terkait dengan proyek jalan di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Bengkulu Utara. Proyek ini baru tuntas 2021 lalu namun saat ini sudah rusak parah.

Politisi Partai Perindo tersebut menilai banyak kejanggalan dalam proyek tersebut. Apalagi ia menilai dana sekitar Rp 3 miliar untuk jalan tersebut harusnya bisa memiliki kualitas yang bagus. Sedangkan saat ini kondisi jalan rusak parah.

"Jika perlu aparat hukum harus turun. Ini aneh. Pekerjaan baru 3 bulan tuntas, namun sudah rusak berat. Artinya ada masalah," tegas Febri.

Terkait alasan tanah yang labil hingga menyebabkan longsor, ia yakin jika sejak awal hal tersebut sudah diketahui oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Bengkulu sebagai pemilik pekerjaan. Sehingga ia yakin dengan dana sekitar Rp 3 miliar tersebut sudah diperhitungkan untuk kualitasnya.

"Ada proses panjang sebelum menetapkan besaran dan jenis pembangunan. Kondisi seperti itu (tanah labil, red) pastinya sudah diperhitungkan. Justru aneh jika tidak diperhitungkan namun sudah melakukan pekerjaan," ujarnya.

Ia meminta aparat hukum untuk turun memastikan penyebab terjadinya kerusakan tersebut. Ia khawatir jika ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan parah saat pekerjaan baru berumur tiga bulan. "Yang bisa membuktikan itu aparat hukum, makanya kami minta aparat hukum turun," kata Febri.

Jalan tersebut saat ini menjadi jalan utama masyarakat setelah jalan sepanjang pantai barat Ketahun-Batik Nau rusak berat. Sehingga dengan kondisi jalan

saat ini ia dalam waktu dekat kerusakan akan semakin parah.

"Saat ini kondisi jalan sudah ambles sekitar 1 meter. Tanah bahkan keluar dari badan jalan, jika tidak segera ditangani maka jalan akan benar-benar putus," tegasnya.

Ia mendukung rencana peralihan jalan tersebut. Namun ia menilai kerusakan jalan yang

baru dikerjakan tersebut harus tetap dipertanggungjawabkan oleh kontraktor ataupun penyedia pekerjaan. Sehingga tidak terkesan pekerjaan yang sia-sia.

"Harusnya kebijakan relokasi jalan, ataupun pembangunan jembatan sejak 2021 dikerjakan. Saat ini yang harus dipertanggungjawabkan adalah pekerjaan yang baru dikerjakan namun rusak berat," tegasnya.

Ia juga mempertanyakan pernyataan jika kerusakan jalan murni karena faktor alam. Karena hal tersebut harus dilengkapi dengan surat keterangan yang jelas dari menyatakan jika memang terjadi bencana dan menyebabkan pergeseran tanah.

"Tidak bisa hanya ditetapkan sendiri dalam menetapkan. Ada banyak keanehan yang memang harus dipertanyakan," pungkask Febri.

PPK Balai Jalan Nasioanal Bengkulu Mardi mengatakan jalan di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Bengkulu Utara rusak bukan karena akibat pengerjaan proyek. Melainkan disebabkan pergerakan yang berasal dari

bawah tanah.

"Bukan rusaknya itu karena yang kita kerjakan. Rusaknya jalan itu disebabkan oleh kondisi dari pergerakan bawah tanah. Memang daerah itu struktur tanahnya mudah longsor. Tanah seperti ini biasanya tiba-tiba nggak ada penyebab tanahnya turun. Itu memang ada beberapa titik tanahnya bermasalah. Mungkin saya rasa salah satunya di situ juga"ujarnya.

Ia juga mengatakan di jalan tersebut memang ada perbaikan jalan. Tetapi tidak sampai perbaikan ke struktur keseluruhan. Melainkan hanya memperbaiki lubang. Kemudian melakukan pengaspalan. Ada juga membuat dinding penahan. Dinding penahan ini agar tanah tidak bergeser dan itu juga berfungsi untuk menahan luapan sungai.

"Yang itulah aku bilang tadi yang renovasinya itu jalan ini dulunya berlubang. Kita perbaiki lubangnya lalu kita aspal setelah itu jalannya mulus. Pas sudah mulus, kemudian ntah kenapa ambles. Kalau kita liat itu pas-cagempa waktu 17 November itu mungkin ada pergerakan di bawah jadi sehigga jalan itu turun dan itu sudah pernah kita aspal kemudian turun. Nggak mungkin kita biarakan seperti ini maka kita timbun,"tuturnya.

Tahun ini Balai Pelaksanaan Jalan Nasional merencanakan untuk mendesain dan merencanakan untuk mengatasi masalah ini. Sudah ada beberapa opsi. "Opsinya itu mau dibuat jembatan kemudian yang kedua mungkin mau direlokasi," pungkasknya. (qia/cw2)